



EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

¹ Alif Dwi Muhti Utomo, ² Sodik, ³ Gilang Santoso, ⁴ Wirawan Lilo Pambudi, ⁵ Vicky Dwi Firmansyah, ⁶ Anggara Setya Saputra

¹⁻⁶ Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

¹ alifmuhti7@gmail.com.

² sodikhasanah1864@gmail.com.

³ gtigil36@gmail.com.

⁴ wirawanlilo127@gmail.com.

⁵ viiicky0518@gmail.com.

⁶ anggara@unwiku.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan terbatasnya kemampuan sistem persampahan dalam menanganinya. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana, serta pola perilaku masyarakat yang beragam di tiap daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia melalui studi literatur terhadap 10 jurnal ilmiah yang relevan. Kajian dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan mampu menjawab kebutuhan pengurangan dan penanganan sampah secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan masih menghadapi hambatan berupa ketidakseimbangan layanan antarwilayah, pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta rendahnya konsistensi praktik

pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan timbulan sampah maupun dinamika lingkungan yang terjadi di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas daerah, serta pendekatan pelibatan masyarakat yang lebih terstruktur agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: pengelolaan sampah, evaluasi kebijakan, implementasi, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

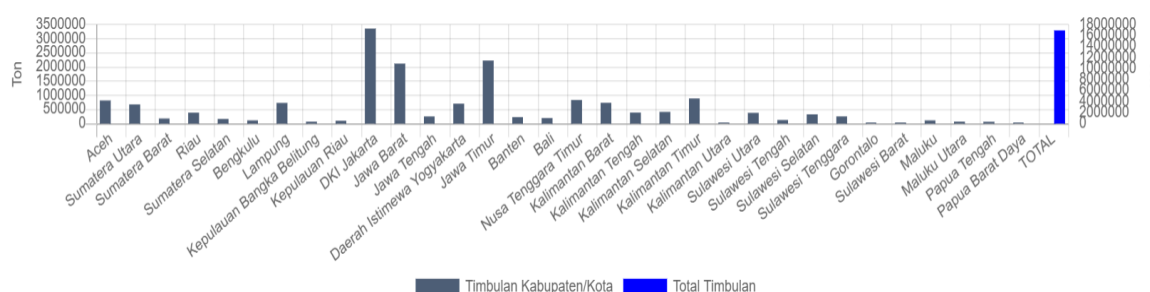
Waste management in Indonesia is facing increasing pressure due to rising societal activities and the limited capacity of waste management systems to handle them. This challenge is not only related to technical aspects but also involves institutional capacity, facility availability, and diverse community behavioral patterns across different regions. This research aims to evaluate the implementation of waste management policies in Indonesia through a literature study of 10 relevant scientific journals. The study was conducted to assess the extent to which policy implementation can address the need for sustainable waste reduction and handling. The findings indicate that waste management efforts still face obstacles such as uneven service distribution across regions, suboptimal infrastructure utilization, weak cross-actor coordination, and low consistency in waste reduction and source separation practices. These conditions show that existing policies have not fully been able to keep pace with increasing waste generation or local environmental dynamics. This research emphasizes the need for strengthening governance, enhancing regional capacity, and more structured community engagement approaches to enable effective waste management and support environmental sustainability.

Keywords: waste management, policy evaluation, implementation, community participation.

PENDAHULUAN

Sampah pada dasarnya merupakan hasil dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang ke lingkungan, baik dari rumah tangga, pasar, perkantoran, maupun kegiatan industri lainnya. Definisi ini juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa sampah adalah bahan padat yang dibuang atau tidak terpakai lagi setelah proses konsumsi atau produksi, dan mencakup berbagai jenis seperti organik dan anorganik sesuai karakteristiknya. Berbagai faktor turut memengaruhi jumlah timbulan sampah di suatu wilayah, termasuk tingkat pendapatan, pola konsumsi, kepedulian lingkungan, dan kebiasaan memilah sampah (Kurniawan et al., 2024). Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin beragam juga memberi tekanan tambahan terhadap kondisi lingkungan, karena kebutuhan dan pola hidup yang berbeda akan menghasilkan jumlah dan jenis sampah yang berbeda pula (Rizky et al., 2024). Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya, tetapi juga dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang memengaruhi pola produksi limbah. Tanpa sistem pengelolaan sampah yang memadai, tekanan tersebut berpotensi menambah beban lingkungan serta memperumit upaya penanganan di tingkat daerah.

Di Indonesia, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar karena tingginya timbulan sampah tidak sebanding dengan kapasitas sistem pengelolaannya. Berbagai daerah menghadapi kondisi serupa, yaitu volume sampah yang terus meningkat sementara fasilitas pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan belum berkembang secara memadai. Pada praktiknya, pemilahan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah ke dalam kategori seperti sampah B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, serta sampah lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan. Setelah proses pemilahan, sampah kemudian dikumpulkan dari sumbernya, baik dengan dibawa langsung ke fasilitas bank sampah maupun diangkut oleh pengelola melalui sarana angkut khusus, sebelum akhirnya diolah untuk mengurangi volume dan menyisakan residu yang akan menuju tempat pemrosesan akhir (Wijaya & Megawati, 2024). Meskipun alur pengelolaan tersebut telah ditetapkan, implementasinya belum berjalan optimal karena ketersediaan sarana pembuangan masih terbatas dan metode pengolahan belum efisien, sehingga banyak sampah tidak diproses dengan tepat (Syahril et al., 2025). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah pada tahun 2025 dari 168 kabupaten/kota mencapai 16.630.186,18 ton per tahun, dengan 66,04% di antaranya belum tertangani secara memadai.



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem pengelolaan sampah di banyak wilayah belum mampu mengikuti peningkatan aktivitas masyarakat dan laju pertumbuhan sampah. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi lingkungan, mulai dari penumpukan sampah di permukiman hingga tekanan pada ekosistem akibat pembuangan sampah di saluran air, ruang publik, sungai, dan laut (Ardiansyah et al., 2024). Kondisi ini



semakin diperburuk oleh keterbatasan jumlah tenaga kebersihan serta fasilitas pengangkutan yang tidak sebanding dengan volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran dan rendahnya prioritas persampahan dalam penganggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang menghambat penyediaan sarana prasarana dan operasional pengelolaan sehingga perkembangan pengelolaan sampah berjalan lambat dan belum didukung fasilitas pembuangan yang memadai (Amaysah et al., 2024). Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah juga memperberat beban sistem yang sudah terbatas kemampuannya. Banyak warga masih memandang bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga partisipasi mereka dalam praktik *reduce*, *reuse*, dan *recycle* belum berkembang optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Indonesia bersifat multidimensi, melibatkan aspek teknis, kelembagaan, dan perilaku masyarakat yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pengelolaan.

Pemerintah Indonesia telah merespon persoalan sampah melalui berbagai kebijakan yang menekankan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai penerapan prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) dalam upaya pengurangan timbulan sampah, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) sebagai pedoman pencapaian target nasional. Di tingkat daerah, kebijakan ini diterjemahkan melalui penyusunan Jakstrada serta pengembangan kelembagaan seperti bank sampah dan TPS 3R. Namun, meskipun kerangka regulasinya sudah komprehensif, implementasinya masih belum konsisten.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kebijakan tidak selalu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga evaluasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan operasional, serta memastikan penggunaan sumber daya berjalan optimal. Menurut Nugroho (2014), evaluasi tidak dimaksudkan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengukur sejauh mana pencapaian kebijakan sesuai harapan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), yang mencakup lima dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, dan responsivitas. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi dan praktik pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual pelaksanaan kebijakan melalui sintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), yang mencakup lima dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, dan responsivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

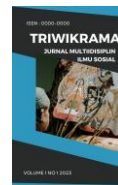
Tabel di bawah menyajikan ringkasan hasil dari 10 studi jurnal yang relevan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia:

Nama Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
Erinaldi, Ade Chandra, Angelina Ramadhani, Ulfa Muti'ah	2025	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Zero Waste di Kabupaten Badung relatif efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap TPA, namun belum efisien karena keterbatasan anggaran dan kapasitas infrastruktur. Faktor pendukung utama berasal dari regulasi yang kuat dan nilai budaya lokal (Tri Hita Karana), sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Nabila Salima, Isnaini Rodyah	2025	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah TPS3R di Desa Durungbedug	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPS3R Desa Durungbedug mampu meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi pembuangan sampah terbuka, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala utama meliputi ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah, keterbatasan tenaga kerja, meningkatnya volume sampah residu, serta partisipasi masyarakat yang belum merata, sehingga efisiensi dan keberlanjutan program masih rendah.
Adilla Hafizah, Diah Ayu Pratiwi, Diva Nada Rizky Nuzlan, Abdurrozzaq Hasibuan	2023	Analisis Dampak Sistem Pengelolaan Sampah TPA Terjun di Kota Medan	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPA Terjun masih menerapkan sistem open dumping yang menyebabkan pencemaran tanah, air tanah, dan udara serta berdampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Meskipun terdapat kerja sama pemanfaatan sampah organik sebagai bahan bakar alternatif, dampak lingkungan negatif masih dominan.



Aji Primanto, Linda Puspitasari	2025	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang belum efektif dan efisien, ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur pengangkutan sampah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Dampak kebijakan terhadap pengurangan sampah plastik dan mitigasi banjir masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan kapasitas institusi dan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif.
Lukman, Akmal Ibrahim, Nur Indrayati Nur Indar, Muh. Tang Abdullah	2022	Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan efektif, ditandai oleh lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan TPS dan TPA, berkurangnya keberadaan bank sampah, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
Aprilia Nur Wijayanti, Yeny Dhokhikah, Abdur Rohman	2023	Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif deskriptif melalui pengukuran timbulan dan komposisi sampah rumah tangga serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat cukup aktif dalam pewadahan dan pembuangan sampah. Namun, pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber masih rendah. Sebagian besar rumah tangga belum menerapkan pemilahan sampah secara konsisten. Akibatnya, volume sampah yang diangkut ke TPA tetap tinggi. Kurangnya pengetahuan lingkungan menjadi faktor utama. Fasilitas pendukung juga masih terbatas.

				Pengelolaan sampah belum berjalan optimal.
Joko Prasetya, Alwan Alfiansyah, Anugrah Perkasa	2024	Evaluasi Kebijakan terhadap Pencegahan Limbah Sampah Pelantar Kota Tanjungpinang	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan sampah pelantar belum efektif. Sampah masih banyak ditemukan di kawasan pelantar dan pesisir. Pengawasan dan penegakan aturan masih lemah. Kesadaran masyarakat pesisir terhadap kebersihan laut rendah. Sarana persampahan di wilayah pesisir terbatas. Sosialisasi kebijakan belum merata. Koordinasi antarinstansi belum optimal. Pencemaran laut masih terus terjadi.
Aprianta Tarigan, Laura Glene Sianturi, Melisa br Sinaga, Putri Intan Siringoringo, Vebri Meliarni Oktavia Naibaho, Julia Ivanna	2024	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Bandar Khalipah	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik. Desa belum memiliki TPA sebagai tempat pembuangan akhir. Sarana pengangkutan sampah masih sangat terbatas. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan rendah. Sosialisasi kebijakan belum optimal. Sistem pengelolaan sampah belum terstruktur. Tujuan kebijakan belum tercapai.
Muara Torang Hadomuan, Retnowati WD Tuti	2022	Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan.	Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Timbulan sampah terus meningkat setiap tahun. Kapasitas fasilitas pengelolaan belum sebanding dengan volume sampah. Pengelolaan sampah dari sumber masih rendah. Kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah kurang. Koordinasi antarinstansi belum efektif. Kebijakan belum menekan laju timbulan sampah.



				Dampak lingkungan masih dirasakan.
Rizki Amilia	2024	Analisis Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum maksimal. Pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2021. Sarana dan prasarana persampahan masih terbatas. Sistem pengangkutan sampah belum merata. Pengawasan pelaksanaan kebijakan lemah. Koordinasi antarinstansi belum optimal. Partisipasi masyarakat masih rendah. Dampak kebijakan belum signifikan.

Penguatan tata kelola pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam menghadapi tekanan lingkungan yang semakin meningkat, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengurangan dan penanganan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, serta tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tata kelola yang efektif diperlukan agar sistem pengelolaan sampah mampu beradaptasi terhadap dinamika wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan sampah merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan integrasi kebijakan, kelembagaan, dan kolaborasi antaraktor (Rittl et al., 2025). Dengan memahami keragaman kondisi dan karakteristik daerah, sistem pengelolaan sampah dapat diarahkan menjadi lebih adaptif dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan berkelanjutan.

1. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat, keberadaan TPS3R, serta inisiatif lokal seperti program Zero Waste memiliki peran penting dalam memperkuat capaian kebijakan. Namun, efektivitas masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, pola pembuangan yang belum berubah, serta lemahnya pengawasan, sehingga banyak wilayah belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya terkait keberadaan kebijakan, tetapi juga bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan daerah menyesuaikan strategi dengan tantangan lokal.

2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Efisiensi dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara sumber daya dan kebutuhan layanan. Temuan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga kerja, sarana pengangkutan, dan biaya operasional sering kali menjadi penghambat utama. Program yang sudah berjalan pun belum selalu memberikan hasil optimal karena fasilitas tidak sebanding dengan volume sampah yang harus ditangani. Ketidakseimbangan kebutuhan dan kapasitas ini menyebabkan banyak kegiatan pengelolaan berjalan lambat,

kurang terkoordinasi, dan tidak mampu menekan timbunan secara signifikan. Oleh karena itu, efisiensi menuntut perencanaan sumber daya yang lebih terarah agar setiap upaya pengelolaan memberikan dampak yang sepadan.

3. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan kebijakan tercermin dari sejauh mana upaya yang dilakukan mampu menjawab persoalan inti di daerah. Banyak wilayah belum memiliki sarana pemrosesan akhir yang layak, sistem pemilahan yang berjalan, maupun mekanisme pencegahan pencemaran yang efektif. Praktik open dumping, pembuangan sembarangan, serta terbatasnya layanan pengangkutan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi masalah mendasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kecukupan tidak hanya berkaitan dengan adanya kebijakan, tetapi juga kemampuan menyediakan dukungan teknis dan kelembagaan yang memadai, sehingga persoalan sampah tidak terus berulang.

4. Keadilan (Equity/Fairness)

Aspek keadilan dalam pengelolaan sampah muncul ketika layanan, fasilitas, dan dampak kebijakan tidak dirasakan secara merata. Sebagian masyarakat memiliki akses terhadap layanan yang lebih baik, sementara wilayah lain—terutama desa, pesisir, dan kawasan padat penduduk masih menghadapi keterbatasan sarana dasar. Ketidakmerataan partisipasi masyarakat, intensitas sosialisasi, serta kualitas fasilitas semakin mempertegas ketimpangan yang terjadi. Pada beberapa daerah, kelompok tertentu bahkan menanggung risiko lingkungan lebih besar akibat lokasi tempat pembuangan atau lemahnya pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan masih menjadi tantangan penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang adil.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi lingkungan. Namun temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak program pengelolaan sampah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar seperti pemilahan yang konsisten, pengangkutan yang teratur, dan pencegahan pencemaran. Kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi, serta minimnya inovasi membuat kebijakan berjalan jauh di bawah ekspektasi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan perlu lebih peka terhadap dinamika lapangan agar mampu menghadirkan layanan yang relevan dan selaras dengan tantangan di setiap wilayah.

KESIMPULAN

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa upaya yang telah dirancang pemerintah belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang kuat dan merata di berbagai daerah. Kerangka regulasi sebenarnya telah memberikan arah yang jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang membuat hasil di lapangan berjalan di bawah potensi yang seharusnya. Beragam permasalahan teknis, koordinatif, dan sosial menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun tekanan lingkungan yang terus meningkat. Temuan dari berbagai studi memperlihatkan pola yang konsisten bahwa kebijakan yang tersedia belum cukup mendorong kinerja pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah masih membutuhkan penguatan yang lebih menyeluruh agar dapat mencapai tujuan lingkungan dan pelayanan publik yang lebih baik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penguatan kebijakan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah, penyediaan sarana yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas aktor agar



pelaksanaan di lapangan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan adanya pendanaan yang cukup, standar operasional yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang lebih tegas untuk menjaga konsistensi implementasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan dan perluasan fasilitas pemilahan serta pengurangan sampah dari sumbernya. Pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan sesuai karakteristik wilayah akan membantu kebijakan berjalan lebih responsif dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaysah, Ngadisah, & Rahman, D. A. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh tahun 2021. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(2), 740-755.
- Amilia, R. (2024). Analisis evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 442-447.
- Ardiansyah, N., Taufiq, M., Hendra, H., Adilansyah, A., & Rizkiani, F. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima. *Jurnal IJI (Intelektual Madani Indonesia)*, 4(3), 60-67.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th ed. New York: Routledge.
- Erinaldi, E., Chandra, A., Ramadhani, A., & Muti'ah, U. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste: Studi kasus di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 908-918.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. D. (2022). Evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7-14.
- Hafizah, A., Pratiwi, D. A., Nuzlan, D. N. R., & Hasibuan, A. (2023). Analisis dampak sistem pengelolaan sampah TPA Terjun di Kota Medan. *ZAHRA: Journal of Health and Medical Research*, 3(3), 320-329.
- Kurniawan, A., & Fuaddah, A. (2024). Memberdayakan rumah tangga untuk pengelolaan sampah berkelanjutan: Studi kesadaran masyarakat di Kota Semarang. *Journal of Urban Sociology*, 7(2), 112-122.
- Lukman, Ibrahim, A., Indar, N. I. N., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 177-181.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Belajar.
- Prasetya, J., Alfiansyah, A., & Perkasa, A. (2024). Evaluasi kebijakan terhadap pencegahan limbah sampah pelantar Kota Tanjungpinang (Studi penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 3(1), 111-121.
- Primanto, A., & Puspitasari, L. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 5(2), 157-174.
- Rittl, L. G. F., Zaman, A., & de Oliveira, F. H. (2025). Digital transformation in waste management: Disruptive innovation and digital governance for zero-waste cities in the Global South as keys to future sustainable development. *Sustainability*, 17(4), 1608.
- Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi. (2024). Model collaborative governance pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(1), 12-29.



- Salima, N., & Rodiyah, I. (2025). Policy evaluation of TPS3R waste management in Durungbedug Village. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(4), 1-16.
- SIPSN. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Data 2025)*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Syahril, Simbara, A., Boy, G., Arifhan, R. F., & Margana, R. R. (2025). Inovasi dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Bumi Lestari*, 25(2), 1-11.
- Tarigan, A., Sianturi, L. G., Sinaga, M. br., Siringo-ringo, P. I., Naibaho, V. M. O., & Ivanna, J. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bandar Khalipah. *Majalah Ilmiah Methoda*, 14(2), 268-273.
- Wijaya, M. E. B. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. *Publika*, 12(4), 997-1010.
- Wijayanti, A. N., Dhokhikah, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *JPLB (Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan)*, 7(1), 28-45.